



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theodore Sutarto

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan  
Ekonomi Digital

**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan  
Ekonomi Digital

**Theodore Sutarto**

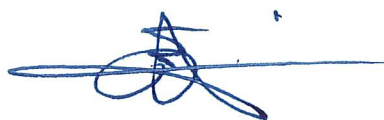
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.1. Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i>	2,5 miliar Faktur Transaksi
		1.2 Persentase Penyelesaian <i>Legal Drafting ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i>	100%
		1.3 Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi <i>Pilot Project Gig Economy</i>	80%
2	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	85%
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Posisi Runding Indonesia untuk DEFA	80%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	92%

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. <i>Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital</i>	Rp 2.632.285.000
<b>Total</b> <i>(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)</i>	<b>Rp 2.632.285.000</b>

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital,



**Ali Murtopo Simbolon**

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital,



**Theodore Sutarto**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 1.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan		
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang terintegrasi, khususnya pada sektor ekonomi digital. Fokus kegiatan diarahkan pada pengembangan ekonomi digital agar kebijakan yang disinergikan mampu memberikan manfaat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.		
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.1. Jumlah Volume Transaksi <i>E-commerce</i>		
<b>Deskripsi IKU</b>	<b>Definisi</b>		
	<p><b>Jumlah Volume Transaksi <i>E-commerce</i></b> adalah total faktur transaksi ekonomi (penjualan atau pembelian) barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet atau platform perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>). Target tahunan diturunkan dari target nilai transaksi <i>e-commerce</i> sebagaimana tercantum dalam RPJMN.</p> <p>Peningkatan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> mencerminkan keberhasilan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta penguatan ekosistem ekonomi digital. Cakupan transaksi meliputi faktur penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa pada sektor bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, serta organisasi publik maupun swasta lainnya yang dilakukan melalui jaringan internet.</p> <p>Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dilakukan terhadap program atau kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital nasional yang bertujuan meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.</p>		
	<b>Formula</b>		
	Jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> bersumber dari data Bank Indonesia (BI) yang diperbarui secara berkala setiap 3 bulan (triwulanan).		
	<b>Tujuan</b>		
Mendorong percepatan pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital nasional guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.			
<b>Satuan Pengukuran</b>	Faktur transaksi		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Bank Indonesia		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran		
<b>Sumber Data</b>	Laporan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> triwulanan dari Bank Indonesia		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity

<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	2,4 miliar faktur transaksi	N/A	2,4 miliar faktur transaksi	2,73 miliar faktur transaksi	<b>2,5 miliar faktur transaksi</b>
<b>s.d. Triwulan I</b>	0,6 miliar faktur transaksi	752 juta faktur transaksi	0,6 miliar faktur transaksi	0,91 miliar faktur transaksi	0,6 miliar faktur transaksi
<b>s.d. Triwulan II</b>	1,2 miliar faktur transaksi	752 juta faktur transaksi	1,2 miliar faktur transaksi	0,91 miliar faktur transaksi	1,2 miliar faktur transaksi
<b>s.d. Triwulan III</b>	1,8 miliar faktur transaksi	1,49 miliar faktur transaksi	1,8 miliar faktur transaksi	2,73 miliar faktur transaksi	1,8 miliar faktur transaksi
<b>s.d. Triwulan IV</b>	2,4 miliar faktur transaksi	N/A	2,4 miliar faktur transaksi	2,73 miliar faktur transaksi	<b>2,5 miliar faktur transaksi</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL</b>	<b>KODE IKU: 1.2</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan		
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang terintegrasi, khususnya pada sektor ekonomi digital. Fokus kegiatan diarahkan pada pengembangan ekonomi digital agar kebijakan yang disinergikan mampu memberikan manfaat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.		
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.2. Persentase Penyelesaian <i>Legal Drafting ASEAN Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA)		
<b>Deskripsi IKU</b>	<b>Definisi</b>		
	Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, pada hakikatnya melakukan kerja sama internasional bertujuan untuk mewujudkan politik luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional yang diamanatkan kepada pemerintahan baru adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, telah diidentifikasi beberapa sektor kunci, antara lain: manufaktur (hilirisasi), jasa, konstruksi/perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, serta ekonomi hijau (transisi energi). Khusus pada sektor ekonomi digital, Indonesia Tengah berupaya memperkuat dan mengembangkan ekosistem digital nasional. Terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mendukung pengembangan ekosistem tersebut, salah satunya melalui kerja sama internasional di tingkat regional, yaitu ASEAN <i>Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA). Melalui ASEAN DEFA, diharapkan dapat terwujud dukungan pengembangan ekosistem digital yang dilakukan secara kolaboratif bersama negara-negara anggota ASEAN, sehingga ekosistem digital di tingkat regional dapat mempercepat pengembangan ekosistem digital di Indonesia.		
	<b>Formula</b>		
	$\% \text{Penyelesaian DEFA} = (\text{Jumlah Paragraf yang Disepakati} / \text{Jumlah Paragraf Keseluruhan}) \times 100\%$ Persentase ini diperoleh dari <i>report set</i> yang disampaikan oleh ASEAN Secretariat.		
	<b>Tujuan</b>		
Mengukur tingkat pemenuhan komitmen Indonesia dalam penyelesaian <i>legal drafting</i> ASEAN DEFA.			
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	ASEAN Secretariat		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Chair of ASEAN Secretariat		
<b>Sumber Data</b>	ASEAN DEFA <i>Report Set</i>		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value

<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>73,85%</b>	<b>100%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%	37,74%	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	57,61%	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%	61,44%	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%	<b>73,85%</b>	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 1.3

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang terintegrasi, khususnya pada sektor ekonomi digital. Fokus kegiatan diarahkan pada pengembangan ekonomi digital agar kebijakan yang disinergikan mampu memberikan manfaat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.3. Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi <i>Pilot Project Gig Economy</i>
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian hasil pelaksanaan inisiasi pengembangan <i>gig economy</i> melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi peserta pada lokasi <i>pilot project gig economy</i> di Jakarta. IKU ini merupakan IKU direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada level Eselon I yang selanjutnya diturunkan (<i>cascading</i>) kepada Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital pada tahun 2026. Dengan demikian, perlu adanya pematangan konsep program <i>gig economy</i> sebelum pelatihan dilaksanakan untuk keberlanjutan program yang lebih baik.</p> <p>Target indikator ini ditetapkan sebesar 80% dari total peserta yang hadir dan mengikuti pelatihan, Adapun peserta tersertifikasi adalah peserta yang dinyatakan lulus dan menerima sertifikat resmi dari mitra penyedia pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i>. Mitra penyedia pelatihan direncanakan melibatkan perusahaan teknologi (<i>tech company</i>), institusi akademik, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam pengembangan talenta ekonomi digital.</p> <p>Pengukuran difokuskan pada proporsi peserta pelatihan yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan hingga tuntas dan memperoleh sertifikat kompetensi dari mitra penyedia pelatihan sebagai bentuk pengakuan atas penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekosistem ekonomi digital dan pasar kerja berbasis <i>platform</i>.</p> <p>Capaian IKU ini mencerminkan efektivitas koordinasi program pengembangan sumber daya manusia digital dalam membangun tenaga kerja <i>gig economy</i> yang kompeten, adaptif terhadap transformasi digital, serta siap berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan kualitas SDM sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Persentase peserta pelatihan yang tersertifikasi di lokasi <i>pilot project gig economy</i> pada tahun 2026 dilakukan dengan formulasi, sebagai berikut:</p> <p>Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi (%) = (Bobot Penyelesaian Konsep Program + Bobot Peserta yang Tersertifikasi) × 100%</p> <p>Bobot penyelesaian konsep program = <math>\left( \frac{\text{Jumlah komponen konsep yang selesai}}{\text{Jumlah komponen konsep yang ditargetkan}} \right) \times 50</math></p> <p>Bobot peserta pelatihan yang tersertifikasi =</p> <p><math>\left( \frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang lulus dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan}} \right) \times 50</math></p> <p>dengan komponen perhitungan penyelesaian konsep program sebanyak 5 komponen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka konseptual dan latar belakang program</li> <li>2. Konsep alur pelaksanaan pelatihan</li> <li>3. Desain skema pelatihan dan skema sertifikasi</li> <li>4. Penyusunan kalender pelatihan melalui kerja sama dengan mitra</li> <li>5. Mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi</li> </ol>

	<p>Dalam hal tahun 2026 merupakan tahap awal (<i>pilot</i>), pembobotan diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelesaian konsep program: 50</li> <li>● Peserta tersertifikasi: 50</li> </ul>			
	<b>Tujuan</b>			
	Memastikan bahwa pelaksanaan inisiasi pengembangan <i>gig economy</i> melalui lokasi <i>pilot project</i> mampu menghasilkan peserta pelatihan yang tersertifikasi serta memperoleh pengakuan formal sesuai dengan kebutuhan ekosistem ekonomi digital.			
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital			
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital			
<b>Sumber Data</b>	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i>			
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low	
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity	
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect		
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.2. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lainnya, serta memperoleh dukungan yang memadai dalam implementasinya.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital diamanatkan untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan/atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;</li> <li>Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;</li> <li>Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;</li> <li>Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi digital; dan</li> <li>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Proses tersebut dinyatakan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui sekurang-kurangnya empat dimensi, yaitu: (1) Perencanaan Kebijakan, (2) Implementasi Kebijakan, (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta (4) Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dimaksud dapat berupa rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, perencanaan program, serta dokumen kebijakan lainnya, seperti rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen relevan lainnya yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital.</p> <p>Sejak diluncurkannya Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 pada tahun 2023, pelaksanaan indikator ini diarahkan untuk mengawal implementasi Buku Putih tersebut, khususnya dalam konteks infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), iklim usaha dan keamanan siber, inovasi, serta investasi.</p> <p>Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait mengenai masing-masing pilar pengembangan ekonomi digital sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030, yang mencakup infrastruktur digital, SDM, iklim usaha dan keamanan siber, serta inovasi dan investasi;</li> <li>Rapat sinkronisasi dengan K/L terkait guna memastikan keselarasan Buku Putih dengan rencana kerja masing-masing K/L;</li> </ol>

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pilar pengembangan ekonomi digital;
4. Rapat koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pelatihan pada lokasi proyek percontohan (*pilot project*) *gig economy* di Jakarta; dan
5. Perencanaan kegiatan tahun 2027.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

**Tahap Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Tahap ini menjadi dasar pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Dokumen yang ditargetkan pada tahap ini meliputi:

1. Notula/risalah rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital pada aspek infrastruktur, SDM, iklim usaha dan keamanan siber, inovasi, dan investasi;
2. Konsep program pelatihan pengembangan SDM pada lokasi *pilot project gig economy*; dan/atau
3. Matriks keselarasan Buku Putih dengan rencana kerja K/L terkait.

**Tahap Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Fokus pada tahap ini Adalah penerjemahan kebijakan ke dalam program dan kegiatan konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Dokumen yang ditargetkan meliputi:

1. Notula rapat implementasi bersama K/L terkait,
2. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan di lokasi *pilot project gig economy*, dan/atau
3. Dokumen *monitoring* awal implementasi Buku Putih (progress pelaksanaan pilar Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030)

**Tahap Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Tahap ini merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan

	<p>tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.</p> <p>Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;</li> <li>• Kertas Kerja Kebijakan;</li> <li>• Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);</li> <li>• Memo Kebijakan;</li> <li>• Hasil Konsultasi;</li> <li>• Laporan Hasil Evaluasi;</li> <li>• Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.</li> </ul> <p>Rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i>, dan/atau</li> <li>2. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.</li> </ol> <p><b>Tahap Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</b></p> <p>Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.</p> <p>Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)</li> <li>• Memo Kebijakan;</li> <li>• Rancangan Kebijakan;</li> <li>• Hasil Konsultasi;</li> </ul> <p>Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahap ini adalah Dokumen komunikasi kebijakan berupa materi presentasi, infografik, dan/atau ringkasan eksekutif yang dimanfaatkan.</p>
	<p><b>Formula</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b></p> <math display="block">\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%</math> </li> <li> <p><b>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b></p> <math display="block">\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%</math> </li> <li> <p><b>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b></p> <math display="block">\begin{aligned} \text{Nilai Tahapan Ketiga} \\ = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\% \end{aligned}</math> </li> <li> <p><b>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b></p> <math display="block">\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math> </li> <li> <p><b>5. Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi</b></p> </li> </ol>

	% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat		
	<b>Tujuan</b>		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Ekonomi Digital.		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Sumber Data</b>	Laporan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dan/atau K/L teknis		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran
			(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	80%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	80%	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	80%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	80%	65%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.2. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lainnya, serta memperoleh dukungan yang memadai dalam implementasinya.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital diamanatkan untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan/atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;</li> <li>g) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;</li> <li>h) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital;</li> <li>i) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi digital; dan</li> <li>a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital.</li> </ul>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding Indonesia untuk ASEAN DEFA
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Proses tersebut dinyatakan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui sekurang-kurangnya empat dimensi, yaitu: (1) Perencanaan Kebijakan, (2) Implementasi Kebijakan, (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta (4) Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dimaksud dapat berupa rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, perencanaan program, serta dokumen kebijakan lainnya, seperti rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen relevan lainnya yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital.</p> <p>Kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding Indonesia untuk ASEAN <i>Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Monitoring</i> substansi ASEAN DEFA yang perlu dikoordinasikan dengan K/L dalam rangka penyiapan posisi runding;</li> <li>2. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk ASEAN DEFA dengan K/L terkait;</li> <li>3. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk ASEAN DEFA.</li> </ol> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p><b>Tahap Pertama: Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Tahap ini menjadi dasar pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p> <p>Keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini antara lain:</p>

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

Notula/Nota Dinas Rapat Koordinasi Pembahasan isu Chapter ASEAN DEFA yang masih belum disepakati.

#### **Tahap Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Fokus pada tahap ini adalah penerjemahan kebijakan ke dalam program dan kegiatan konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

Notula/Nota Dinas Rapat Koordinasi Pembahasan Chapter ASEAN DEFA terkait isu yang belum disepakati serta alternatif-alternatifnya.

#### **Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Tahap ini merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah Rumusan matriks posisi K/L untuk masing-masing *chapter* pada ASEAN DEFA.

	<p><b>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</b></p> <p>Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.</p> <p>Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)</li> <li>• Memo Kebijakan;</li> <li>• Rancangan Kebijakan;</li> <li>• Hasil Konsultasi;</li> </ul> <p>Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rumusan kertas posisi Indonesia dalam perundingan ASEAN DEFA.</p>		
	<b>Formula</b>		
	<p><b>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b></p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p><b>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b></p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p><b>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b></p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p><b>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b></p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p><b>5. Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi</b></p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	<b>Tujuan</b>		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Ekonomi Digital.		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Sumber Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity

<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

**KODE IKU: 3.1**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS. 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan sesuai standar, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan;</li> <li>b) Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor;</li> <li>c) Akurasi informasi dan berbasis data yang valid;</li> <li>d) Transparansi proses dan hasil pelayanan;</li> <li>e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital diukur melalui survei pelayanan kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.</p> <p>Aspek yang dapat diukur dalam survei tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan, yang mencakup ketanggapan dalam pelayanan, keandalan pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, kepastian pelayanan, serta sikap dalam pelayanan.</li> <li>2. Aspek kepuasan substansi layanan, yang mencakup koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; pengendalian pelaksanaan kebijakan; pengelolaan dan penanganan isu; penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga serta memastikan pelaksanaan keputusan dimaksud; serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan dalam sidang kabinet.</li> <li>3. Kritik dan saran</li> </ol>
	<p><b>Formula</b></p> <p>Indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital diukur melalui survei pelayanan kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Nilai indeks diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p>
	$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
	<p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</li> <li>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</li> <li>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</li> <li>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai &lt;2.50</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	

	Mengukur tingkat kepuasan terhadap proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital guna mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct		(X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>3,62 dari 4</b>	<b>3 dari 4</b>
s.d. Triwulan I	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3,62 dari 4*	N/A
s.d. Triwulan II	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3,62 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3,62 dari 4*	N/A
s.d. Triwulan IV	3 dari 4	N/A	3 dari 4	3,62 dari 4	3 dari 4

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

**KODE IKU: 4.1**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS. 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan.</p> <p>Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis pada perspektif yang sama di tingkat kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital. Komponen penilaian Reformasi Birokrasi pada level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital.</p> <p>Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan dengan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan tim kerja,</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi dan manual IKU,</li> <li>3. Penyusunan laporan kinerja triwulanan,</li> <li>4. Penyusunan Renja 2027,</li> <li>5. Penyusunan Revisi Renja 2026,</li> <li>6. Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026,</li> <li>7. Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap triwulan tahun 2026,</li> <li>8. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI,</li> <li>9. Penyusunan matriks manajemen risiko,</li> <li>10. Penyusunan <i>draft</i> Perjanjian Kinerja tahun 2027, dan</li> <li>11. Pelaporan pelaksanaan RB Tematik secara triwulanan, apabila terdapat penugasan pada pemetaan RB Tematik.</li> </ol>
	<p><b>Formula</b></p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan jumlah pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik dibandingkan dengan total rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi untuk menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
	<p><b>Tujuan</b></p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital</p>

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		
<b>Sumber Data</b>	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>85%</b>	<b>N/A</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>92%</b>
<b>s.d. Triwulan I</b>	20%	20%	<b>20%</b>	20%	<b>25%</b>
<b>s.d. Triwulan II</b>	40%	40%	<b>40%</b>	40%	<b>45%</b>
<b>s.d. Triwulan III</b>	60%	60%	<b>60%</b>	60%	<b>70%</b>
<b>s.d. Triwulan IV</b>	<b>85%</b>	<b>N/A</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>92%</b>

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.1. Jumlah volume transaksi e-commerce	2,5 miliar faktur transaksi	Koordinasi kebijakan atau regulasi di bidang e-commerce, meliputi iklim bisnis, tata kelola data, serta pelaksanaan kerja sama terkait ekonomi digital	1. Koordinasi, pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce.	1. Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce.	1. Monitoring dan evaluasi isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce. 2. Monitoring penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce.	1. Monitoring dan evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce. 2. Perencanaan kegiatan tahun 2027
		1.2. Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	100%	Koordinasi dan Penyampaian Posisi Indonesia dalam Perundingan ASEAN-Digital Economy Framework Agreement (DEFA)	1. Menghadiri rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-16 dan ke-17 dalam rangka penyampaian posisi Indonesia. 2. Melaksanakan relay perundingan ASEAN DEFA ke-16 dan ke-17 3. Pelaporan proses legal drafting ASEAN DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	1. Menghadiri rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-18 dan ke-19 dalam rangka penyampaian posisi Indonesia. 2. Melaksanakan relay perundingan ASEAN DEFA ke-18 dan ke-19 3. Menghadiri 27th AECC Meeting 4. Pelaporan proses legal drafting DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	1. Menghadiri rangkaian perundingan DEFA dalam rangka legal drafting ASEAN-DEFA. 2. Melaksanakan relay ASEAN-DEFA. 3. Pelaporan proses legal drafting ASEAN-DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	1. Menghadiri rangkaian perundingan DEFA dalam rangka legal drafting ASEAN-DEFA. 2. Pelaporan ASEAN - DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait. 3. Menghadiri penandatanganan ASEAN-DEFA pada 49th ASEAN Summit dan 40th ASEAN Community Council Meeting.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		1.3.Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi <i>Pilot Project Gig Economy</i>	80%	Pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> melalui kerja sama dengan mitra terkait	1.Penyusunan konsep pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> , 2.Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .	1.Finalisasi konsep pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> , 2.Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> , 3.Pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> 4.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .	1. Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> , 2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .	1. Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> , 2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> , 3. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	85%	Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Strategis dalam Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia	<p>1. Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p> <p>2. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), aksesori OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya</p> <p>3. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p>	<p>1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p> <p>2. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), aksesori OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya</p> <p>3. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p>	<p>1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p> <p>2. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), aksesori OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya</p> <p>3. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p>	<p>1. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), aksesori OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya</p> <p>2. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi</p> <p>3. Perencanaan kegiatan tahun 2027.</p>
		2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding Indonesia untuk DEFA	80%	Koordinasi domestik dengan K/L terkait	<p>1. <i>Monitoring</i> substansi ASEAN-DEFA yang perlu dikoordinasikan</p> <p>2. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk ASEAN-DEFA Ke-16 dan Ke-17 dengan K/L terkait</p> <p>3. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk ASEAN-DEFA Ke-16 dan Ke-17</p>	<p>1. <i>Monitoring</i> substansi ASEAN-DEFA yang perlu dikoordinasikan</p> <p>2. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk DEFA ASEAN-DEFA Ke-18 dan ke-19 dengan K/L terkait.</p> <p>3. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk ASEAN-DEFA Ke-18 dan ke-19.</p>	<p>1. Pemantauan capaian proses <i>legal drafting</i> ASEAN-DEFA</p>	<p>1. Pemantauan capaian proses <i>legal drafting</i> ASEAN-DEFA</p> <p>2. Perencanaan kegiatan tahun 2027</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital	1. Penyiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	1. Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1 2. Pelaporan hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1 3. Evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1	1. Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1 2. Penyiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	1. Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 2 2. Pelaporan hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 2 3. Evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1.Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	92%	1. Tingkat capaian kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai 2. Tingkat maturitas SPIP 3. Nilai SAKIP 4. Indeks Perencanaan Pembangunan 5. Capaian Prioritas Nasional (K/L) 6. Tingkat digitalisasi arsip	1. Penyusunan dan penetapan tim kerja 2. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi dan manual IKU 3. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 4. Penyusunan Renja Tahun 2027 5. Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan 6. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	1. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 2. Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026 3. Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan 4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	1. Penyusunan matriks manajemen risiko 2. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 3. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 4. Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan 5. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	1. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 2. Penyusunan <i>draft</i> perjanjian kinerja tahun 2027 3. Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan 4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Jakarta, Januari 2026  
 Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital,

**Theodore Sutarto**